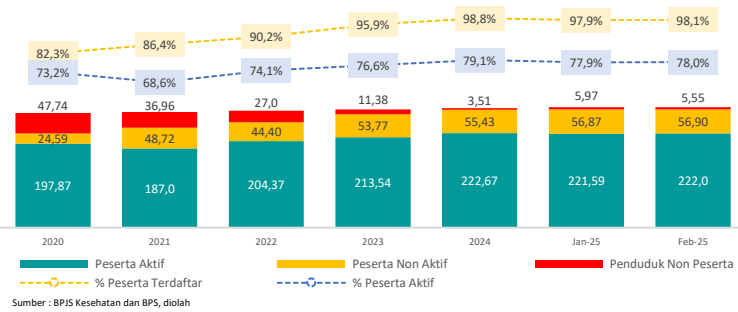


Monthly Report Monitoring JKN

28 Februari 2025

Kepesertaan dan Kesehatan Keuangan

Peserta Aktif dan Non Aktif dalam Juta Jiwa



Cakupan kepesertaan JKN Per 28 Februari 2025 telah mencapai 278,89 juta jiwa atau 98,1% dari proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2025. Cakupan peserta tumbuh 796,6 ribu (0,29%) dibanding 31 Desember 2024. Berdasarkan cakupan peserta yang hampir menyeluruh, fokus saat ini adalah meningkatkan keaktifan peserta JKN disemua segmen, sebagaimana amanat RPJMN 2025-2029.

Capaian kepesertaan aktif sebesar 222,65 juta jiwa atau 78,3% dari proyeksi jumlah penduduk, dan 79,67% dari keseluruhan peserta, peserta aktif tumbuh -0,01% atau berkurang 13,3 ribu jiwa dibanding Desember 2024, penambahan/penurunan peserta aktif didorong oleh beberapa segmen berikut :

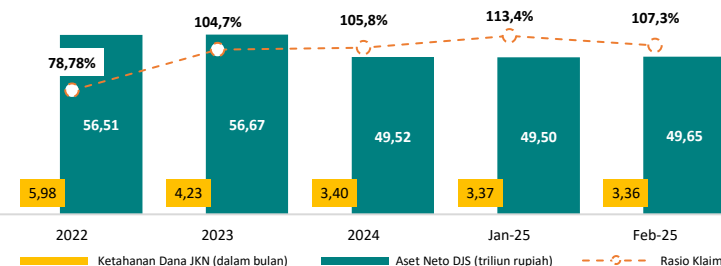
- **PBI JK** +46,1 ribu jiwa (+0,05%)
- **PPUPN** -163,04 ribu jiwa (-0,86%)
- **PPUBU** +253,98 ribu jiwa (+0,68%)
- **PBPU** -130,4 ribu jiwa (-0,76%)
- **BP** -18,3 ribu jiwa (-0,37%)
- **PBPU Pemda** -1,66 ribu jiwa (-0,004%)

No	Segmen Peserta	Februari 2025			
		Aktif	Non Aktif Menunggak	Non Aktif Mutasi	Total Peserta Terdaftar
1	Penerima Bantuan Iuran	96.717.345		18.527.969	115.245.314
2	PPU Penyelenggara Negara	18.694.481	138.834	1.010.172	19.843.487
3	PPU Non Penyelenggara Negara	37.524.689	147.660	9.007.581	46.679.930
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	17.219.520	14.858.946	1.687.067	33.765.533
5	Bukan Pekerja (BP)	4.942.660	34.852	462.037	5.439.549
	a. BP Penyelenggara Negara (BP PN)	4.504.166		411.143	4.915.309
	b. BP Swasta (BP Non PN)	438.494	34.852	50.894	524.240
6	PBPU Pemda	46.897.599		11.021.372	57.918.971
	total Peserta	221.996.294	15.180.292	41.716.198	278.892.784

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Kepesertaan non aktif sebesar 56,8 juta jiwa atau 20,40% dari total peserta, bertambah 1,46 ribu jiwa dibanding 31 Desember 2024. Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 15,18 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPU Mandiri sebesar 14,86 juta (97,88%). Peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 41,7 juta, yang terdiri dari 18,52 juta dari segmen PBI, sebesar 11,02 juta dari segmen PBPU Pemda, dan sebesar 9 juta dari PPU Non PN yang disebabkan oleh perubahan status pekerjaan dan belum menentukan segmen kepesertaan JKN, 1 juta peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lainnya.

Kondisi Kesehatan Keuangan



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Aset Neto DJS Kesehatan diproyeksikan dapat membiayai 3,36 bulan kedepan (**sehat, namun rentan defisit**). Tren rasio klaim di atas 100% perlu diimbangi dengan penguatan kinerja BPJS Kesehatan dalam pengendalian mutu dan biaya jaminan, peningkatan kolektabilitas iuran, serta optimalisasi sumber pendapatan lain, dan hasil investasi. **YoI DJS Kesehatan** sebesar 1,12% atau Rp790,23 miliar, dengan rata-rata kelolaan dana investasi sebesar Rp70,68 triliun, terbagi pada surat utang negara sebesar Rp33,9 triliun (48%), deposito sebesar Rp33,08 triliun (47%), dan SRBI sebesar Rp3,68 triliun (5%), target **YoI** sebagaimana ICK 2025 sebesar 7%.

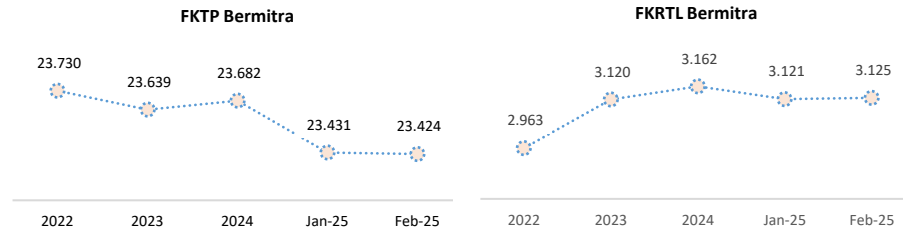
Dana operasional BPJS Kesehatan tahun 2025 ditetapkan 3,55% dari penerimaan iuran program JKN, dan atau maksimal Rp5,98 triliun sebagaimana PMK 134/2024, telah direalisasikan Rp878,55 miliar (15%). Realisasi **Beban terhadap dana operasional + pendapatan investasi (BOPO)** berada diposisi **134,14%**, atau belum memenuhi ketentuan Permenkeu 251 Tahun 2016 yang mengamahkan maksimal BOPO sebesar 95%. **YoI BPJS Kesehatan** hingga Februari sebesar -1,52% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar -Rp163,5 miliar dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp10,77 triliun. **YoI BPJS Kesehatan** ditargetkan dalam ICK Tahun 2025 sebesar 7%.

Per 28 Februari 2025, program JKN mencatatkan surplus operasional yang menyebabkan **peningkatan tipis aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS) sebesar Rp129,03 miliar (YTD)**. Meskipun realisasi beban jaminan kesehatan sebesar Rp29,68 triliun telah melampaui pendapatan iuran yang terkumpul sebesar Rp27,66 triliun, sehingga **rasio klaim sebesar 107,3%**. Tren rasio klaim yang terus berada di atas 100% sejak 2023 menimbulkan tekanan yang masih berkelanjutan terhadap stabilitas keuangan program JKN.

Monthly Report Monitoring JKN

28 Februari 2025

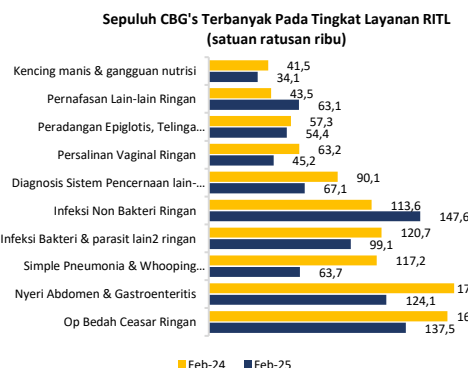
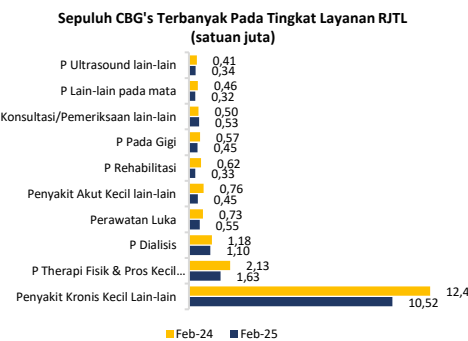
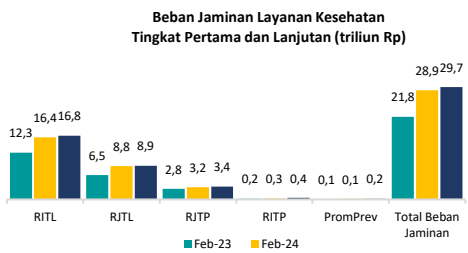
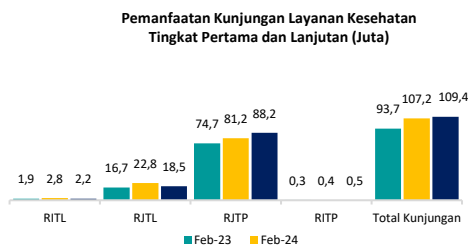
Kerjasama Faskes dan Utilisasi



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

tercatat **3.125**, turun 37 dibanding akhir Tahun 2024. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 4.450 apotek dan 1.221 optik sebagai fasilitas kesehatan Penunjang. Capaian kerja sama FKTP belum memenuhi target ICK 2025 yang ditetapkan DJSN sebesar 23.664 FKTP, begitu juga dengan kerja sama pada FKRTL belum memenuhi ICK yang ditargetkan sebesar 3.133 FKRTL.

Per Februari 2025, **kerja sama dengan FKTP** tercatat sebanyak 23.424, turun 258 FKTP dibanding 31 Desember 2024 (YTD). Penurunan terbesar berasal dari Dokter Praktik Perorangan (DPP) yang berkurang 164 menjadi 4.485. Sementara itu, hanya puskesmas yang mengalami peningkatan sebanyak 4 mitra baru. **Kerja sama FKRTL**



Pemanfaatan layanan kesehatan hingga 28 Februari 2025 meningkat sebanyak 2,1% dibanding periode Februari 2024 (YoY). Pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanyak 88,2 juta kunjungan, mengalami peningkatan 8,6% atau meningkat 6,95 juta dibanding Februari 2024. Selanjutnya diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 18,5 juta kunjungan, menurun -18,6%. Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 2,2 juta kunjungan, menurun -20,9%, dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 0,5 juta, meningkat 15,9%. Berdasarkan hal tersebut, fungsi *gatekeeper* FKTP semakin optimal dalam menyerap tingginya kebutuhan layanan primer peserta JKN. Efisiensi ini dipertegas dengan keberhasilan menekan beban di layanan yang lebih mahal selama 2 bulan terakhir, yaitu penurunan kunjungan RJTL dan RITL, sehingga dapat mendorong efektifitas sistem rujukan berjenjang.

Beban Jaminan pada Februari 2025 mengalami peningkatan 2,7% dibanding Februari 2024 (YoY), dari Rp28,9 triliun menjadi Rp29,7 triliun. Alokasi beban jaminan didominasi pada Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp16,8 triliun atau 56,7% dari keseluruhan beban jaminan, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebesar 30%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11,4%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1,3% dan terkecil adalah promotif dan preventif sebesar 0,6% dari keseluruhan beban jaminan.

Pembayaran manfaat RJTL per Februari 2025 mencapai Rp18,5 triliun, naik 1% dibanding pembayaran manfaat RJTL pada Februari 2024. Jumlah kunjungan RJTL adalah sebesar 8,9 juta kunjungan, dengan diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal, prosedur dialisis, perawatan luka, penyakit akut kecil-kecil lain, dan lain sebagainya. Penurunan mayoritas kasus terbesar CBG's RJTL adalah bukti keberhasilan pengendalian di layanan lanjutan.

Pembayaran manfaat RITL hingga Februari 2025 mencapai Rp16,8 triliun, meningkat 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (YoY). Kasus terbanyak didominasi oleh infeksi non bakteri (ringan), disusul oleh persalinan dengan operasi bedah caesar ringan, serta nyeri abdomen & gastroenteritis. Hampir semua kelompok INA-CBG's RITL hingga Februari 2025 menunjukkan penurunan volume layanan dibandingkan periode yang sama pada 2024, kecuali pernafasan lain-lain ringan dan infeksi non bakteri ringan. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan pola rujukan dan/atau pergeseran layanan dengan kendali mutu dan kendali biaya yang lebih optimal. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kebijakan kendali mutu dan biaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga tidak menimbulkan hambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya dapat diberikan.